



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR

RENCANA KERJA TAHUN 2023

www.yourweb3123.com

Media Sosial :



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan program dan kegiatannya. Dokumen Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 disusun untuk menjawab serta menyesuaikan dengan perkembangan masalah serta isu-isu strategis bidang lingkungan hidup yang semakin kompleks dan dinamis seiring dengan perkembangan pembangunan, terutama terkait dengan sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama sesuai Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen Rencana Kerja ini merupakan hasil diskusi, masukan dan analisis perencanaan pembangunan lingkungan hidup yang telah disepakati oleh berbagai pihak sesuai arah kebijakan, strategi, dan tujuan DLH Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat di bidang lingkungan hidup. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Pada akhirnya, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pembangunan lingkungan hidup yang lebih baik di Jawa Timur. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Akademisi serta LSM, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen ini.

Surabaya, Juli 2022
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. ARDO SAHAK,SE,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640804 198803 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	3
I.3. Maksud dan Tujuan	5
I.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	8
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra PD.....	8
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	26
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	35
II.4. Review terhadap Rancangan RKPD.....	39
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	85
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	107
III.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	107
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja	108
III.3. Program dan Kegiatan	109
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	132
IV.1. Rencana Kerja dan Pendanaan	132
IV.2. Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi	134
IV.3. Prioritas Perangkat Daerah	139
BAB V PENUTUP	140
V.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	140
V.2. Rencana Tindak Lanjut	140

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2020 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2021 (Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan – Berdasarkan Perubahan Renstra 2019-2024	9
Tabel II. 2.	Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jatim	27
Tabel II. 2.1.	Nilai IKLH, IKA, IKU dsn IKTL Tahun 2015-2021	29
Tabel II. 2.2	Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jatim	32
Tabel II. 3.	Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023.....	40
Tabel II.4	Usulan Kabupaten kota hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2023 yang diakomodir.....	83
Tabel II. 5.	Usulan Kabupaten kota hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023 yang tidak diakomodir	106
Tabel II. 6.	Dukungan Perangkat Daerah dalam Pokok-pokok Pikiran Dewan	106
Tabel III. 1.a	Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023	107
Tabel III. 1.b	Prioritas dan Kebijakan pembangunan Nasional dan Jawa Timur Tahun 2023	107
Tabel III. 2.	Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan Kebijakan pembangunan Nasional dan Jawa Timur Tahun 2023	108
Tabel III. 2.1	Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 mengacu RPJMD Jawa Timur 2019-2024	109
Tabel III. 3.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju 2024.....	110
Tabel IV. 1.	Prioritas Perangkat Daerah Yang mendukung Prioritas Provinsi	134
Tabel IV. 2.	Prioritas Perangkat Daerah	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan antar Dokumen	2
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang bersifat operasional.

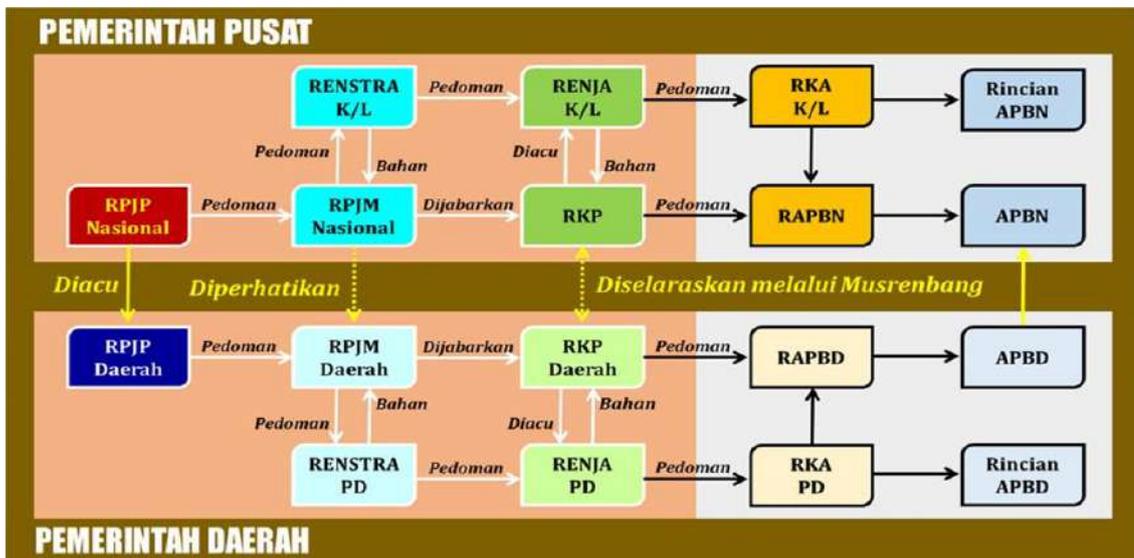
Sebagai Dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani Perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi daerah. Renja Perangkat daerah (PD) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD. Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka perlu adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas,

sedangkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi dapat menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Substansi dalam Rancangan Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 merupakan hasil penyelarasan antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, serta pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan. Di samping itu, Rancangan Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi arahan kebijakan, indikator kinerja, kelompok sasaran, program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen perubahan kedua RPJMD 2019-2024. Secara singkat, keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lain ditunjukkan pada Gambar I.1.



Gambar I. 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah meliputi :

- a. Persiapan Penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan ;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- f. Penetapan

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Kerangka Arah yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD serta didasarkan pada evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang responsive gender untuk pemerintah daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri No. 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur ;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Derah Provinsi jawa Timur Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor : 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor : 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

I.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah .

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai Pedoman :

- 1) Pelaksanaan Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Pelaksanaan dan Evaluasi Program dan Kegiatan;
- 3) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

I.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

Bab ini memuat :

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;
- II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD;
- II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD;
- II.4. Review terhadap RKPD; dan
- II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

- III.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional;
- III.2. Tujuan dan Sasaran Renja; dan

III.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang rencana kerja perangkat daerah yang dijabarkan dalam program, kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, dan kebutuhan dana, serta target capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan guna mengetahui Program/kegiatan yang tidak memenuhi target atau melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja tahun 2023 di dasarkan pada Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019-2024 dan Perubahan Rencana pemabngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2024, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya , terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2021 sebagaimana berikut :

Tabel 2. 1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2020 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(5+7+9)	11 (10/4)	
1.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	Persentase indikator program yang tercapai (%)	96	75	90	86.67	96.30	92	253.67	264%
		2	Persentase realisasi anggaran (%)	90	94.66	85	93.83	110.39	96	284.49	316%
		3	Indeks profesionalitas ASN (%)	80	72	77	77	100.00	78	227	284%
1.11.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah (dokumen)	8	8	8	8	100.00	8	24	300%
		2	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah (dokumen)			4	4	100.00		4	
1.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Jumlah Dokumen Perencanaan daerah (Renstra, Renja, Perubahan renja, RKA dan DPA) yang tersusun (dokumen)	5	5	5	8	160.00	5	18	360%
1.11.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (kali)	20	20	20	20	100.00	20	60	300%
1.11.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (kali)	15	15	15	15	100.00	15	45	300%
1.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (kali)	15	15	15	15	100.00	15	45	300%

1.11.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (kali)	15	15	15	15	100.00	15	45	300%
1.11.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (kali)	20	20	20	20	100.00	20	60	300%
1.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (pengesahan spj; neraca, lo, lra,lpe, calk; laporan hasil pemeriksaan bpk/inspektorat; lap keuangan bulanan 12, lap hasil rekonsiliasi aset 4, lap rekonsiliasi persediaan 4; laporan prognosis 6 bulan berikutnya) (kali)	38	38	38	38	100.00	38	114	300%
1.11.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (laporan)	12	18	19	19	100.00	2	39	325%
1.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan (lap keuangan bulanan 12) (laporan)	12	12	12	12	100.00	12	36	300%
1.11.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (laporan)	12	12	12	12	100.00	12	36	300%
1.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan (lap keuangan bulanan 12) (laporan)	12	12	12	12	100.00	12	36	300%
1.11.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akutansi perangkat daerah (laporan)	2	2	2	2	100.00	2	6	300%
1.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD (dokumen)	10	10	0	0	-	10	-	-
1.11.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas LHP (draft tanggapan dan Finalisasi tanggapan) (dokumen)	2	2	2	2	100.00	2	6	300%

Renja DLH Prov. Jatim Tahun 2023

1.11.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan (lap keuangan bulanan 12) (laporan)	12	12	12	12	100.00	12	36	300%
1.11.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis (laporan)	1	1	1	1	100.00	1	3	300%
1.11.01.103	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (dokumen)	8	5	8	8	100.00	8	21	
1.11.01.103.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencann kebutuhan BMD SKPD (laporan)	0	0	-	-	-	-	-	-
1.11.01.103.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.01.103.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (laporan)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.01.103.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (kegiatan)	1	1	1	1	100.00	1	3	300%
1.11.01.103.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	-	-	-	-	0.00	-	0	-
1.11.01.103.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	-	-	-	-	0.00	-	0	-
1.11.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	5	5	5	100.00	5	0	0%
1.11.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5	5	100	90	90.00	5	100	2000%
1.11.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	300	300	151	151	100.00	0	451	150%

Renja DLH Prov. Jatim Tahun 2023

1.11.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang tersusun	1	0	1	0	0.00	0	0	0%
1.11.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	2	12	12	100.00	2	16	800%
1.11.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	0	12	12	100.00	2	14	700%
1.11.01.1.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun	2	2	0	0	0	0	2	100%
1.11.01.1.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1	0	0	0	0	0	0	0%
1.11.01.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah Pemindahan Tugas ASN	1	0	0	0	0	0	0	0%
1.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang ikut Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	175	0	0	0	-	175	175	100%
1.11.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0	0	0	-	0	0	-
1.11.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0	0	0	-	0	0	-
1.11.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan	5	5	5	5	100.00	5	15	300%
1.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket pengadaan	1	1	1	1	100.00	1	3	300%
1.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	1	1	1	1	100.00	1	3	300%
1.11.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan	1	1	1	1	100.00	1	3	300%
1.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket pengadaan	0	0	0	0	-	0	0	-
1.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	1	1	1	1	100.00	1	3	300%
1.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	jumlah paket pengadaan	1	0	0	0	-	0	0	0%

Renja DLH Prov. Jatim Tahun 2023

	Perundang-undangan									
1.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah paket pengadaan	0	0	0	0	-	0	0	-
1.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi"	25	0	25	20	80.00	25	45	180%
1.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	0	0	0	0	-	0	0	-
1.11.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	0	0	0	0	-	0	0	-
1.11.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Informasi yang terbangun	2	0	0	0	-	0	0	0%
1.11.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	0	4	4	100.00	6	10	167%
1.11.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	1	0	0	0	-	1	1	-
1.11.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	2	0	0	0	-	0	0	-
1.11.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Kendaraan	0	0	0	0	-	0	0	-
1.11.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Kendaraan	2	0	0	0	-	0	0	-
1.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	2	2	1	2	200.00	0	4	200%
1.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	5	5	5	5	100.00	0	10	200%
1.11.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap	0	0	0	0	-	0	0	-
1.11.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	-	0	0	-
1.11.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	0	0	0	0	-	0	0	-

Renja DLH Prov. Jatim Tahun 2023

1.11.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	0	0	0	-	2	2	100%
1.11.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	0	2	2	100.00	2	4	133%
1.11.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	0	1	1	100.00	6	7	88%
1.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	50	0	50	0	0.00	0	0	-
1.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	0	12	12	100.00	12	24	200%
1.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa	6	0	6	6	100.00	6	12	200%
1.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa	3	0	5	5	100.00	5	10	333%
1.11.01.1.08.05	Penyediaan jasa Pengamanan kantor	Jumlah Jasa	1	0	0	0	-	0	0	-
1.11.01.1.08.06	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Perkantoran	Jumlah Jasa	1	0	0	0	-	0	0	-
1.11.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	0	100	95	95.00	100	195	195%
1.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	15	0	0	0	-	15	15	-

1.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	20	0	30	20	66.67	20	40	200%
1.11.01.1.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Jasa	0	0	0	0	-	0	0	-
1.11.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	1	0	0	0	-	0	0	-
1.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2	0	5	5	100.00	3	8	400%
1.11.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2	0	0	0	-	0	0	-
1.11.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1	0	0	0	-	0	0	-
1.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	4	0	2	2	100.00	4	6	150%
1.11.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	1	1	1	100.00	0	2	200%
1.11.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	3	3	100.00	1	4	-
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur yang tersusun	2	0	2	2	100.00	2	4	200%
		1 penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	0	0	1	1	100.00	25	26	#DIV/0!

Renja DLH Prov. Jatim Tahun 2023

		2	Persentase Pengendalian Pelaksanaan RPPLH	35	0	20	20	100.00	25	45	129%
2.11.02.101.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi		jumlah kegiatan Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi	2	0	2	1	50.00	2	3	150%
2.11.02.101.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi		Jumlah kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	25	0	1	3	300.00	15	18	72%
2.11.02.102	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Persentase tersusunnya dokumen KLHS Tata Ruang dan RPJMD Provinsi Jawa Timur	100	0	50	100	200.00	65	165	165%
2.11.02.102.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		jumlah kegiatan pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	4	0	1	1	100.00	2	3	75%
2.11.02.102.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		jumlah kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	2	0	1	1	100.00	1	2	100%
2.11.02.102.04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	2	0	1	1	100.00	1	2	100%
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Terpublikasikannya data hasil pemantauan kualitas air Badan Air Setiap Bulan Sekali (kali)	12	10	12	12	100.00	12	34	283%
		2	Jumlah Kabupaten/ kota yang meningkat kualitas udara	4	1	1	1	100.00	2	4	100%
		3	Luas lahan kritis yang dikonservasi/ rehabilitasi (Ha)	50	0	3,5	8.2	-	30	38.2	-
2.11.03.101	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	Jumlah titik pantau kualitas air	70	85	53	75	141.51	60	220	314%
		2	Jumlah titik pantau kualitas udara	28	16	16	16	100.00	20	52	186%
		3	Jumlah titik pantau kualitas air laut	9	0	2	2	100.00	7	9	100%

2.11.03.101.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	jumlah pelaksanan kegiatan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	107	0	75	91	121.33	87	178	166%
2.11.03.101.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	40	0	1	1	100.00	2	3	8%
2.11.03.101.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1 PAD atau Retribusi Daerah (Milyar)	1.3	1.30	1	1.12	112.00	1,1	2.6	200%
		2 Indeks Kepuasan Masyarakat/Pelanggan (IKM) terhadap pelayanan uji kualitas lingkungan hidup	76	77.47	76	85	111.84	76	238.47	314%
		3 Jumlah sampel uji kualitas lingkungan	2400	3800	1500	2566	171.07	1600	7966	332%
2.11.03.102	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sarana dan Prasarana penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan	15	2	8	8	100.00	10	20	133%
2.11.03.102.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah informasi peringatan dini pencemaran dan kerusakan lingkungan pada masyarakat	24	0	10	10	100.00	18	28	117%
2.11.03.102.02	Pengisolasian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi isolasi pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	26	0	6	6	100.00	22	28	108%
2.11.03.102.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi Penghentian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	26	0	4	12	300.00	22	34	131%

Renja DLH Prov. Jatim Tahun 2023

2.11.03.103	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	85	0	7	7	100.00	45	52	61%
2.11.03.103.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	prosentase penghentian aktivitas pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	20	0	0	0	-	0	0	-
2.11.03.103.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	20	0	0	0	-	10	10	-
2.11.03.103.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	25	0	2	2	100.00	15	17	68%
2.11.03.103.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	20	0	5	5	100.00	10	15	75%
2.11.03.103.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	15	0	0	0	-	0	0	0%
2.11.04	Program pengelolaan keanekaragaman Hayati (kehati)	Jumlah Kabupaten/ Kota yang diberikan pembinaan dan pengelolaan KEHATI	20	0	8	8	100.00	12	20	100%
2.11.04.101	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	jumlah kegiatan action learning yang dilaksanakan dikabupaten/kota (usaha/kegiatan)	200	0	185	320	172.97	190	510	255%
2.11.04.101.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tersusunnya dokumen penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati (DED)	0	0	1	1	100.00	1	2	-
2.11.04.101.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	7	0	12	4	33.33	5	9	129%
2.11.04.101.03	Pengelolaan Kebun Raya	jumlah kegiatan Pengelolaan Kebun Raya	1	0	0	0	-	0	0	0%
2.11.04.101.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	jumlah kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3	0	2	2	100.00	2	4	133%
2.11.04.101.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	jumlah kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	2	0	1	1	100.00	1	2	100%

	Lainnya	Lainnya									
2.11.04.101.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	6	0	5	5	100.00	5	10	167%	
2.11.04.101.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	jumlah kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	1	0	0	0	-	0	0	0%	
2.11.05	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	1 Persentase Limbah B3 yang dikelola	64	63	63,1	74,82	118.57	63.2	201.02	314%	
		2 Persentase penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 skala provinsi	100	100	100	100	100.00	100	300	300%	
2.11.05.101	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Volume Limbah B3 lintas kabupaten/ kota yang berhasil dikumpulkan oleh provinsi	65	0	50	74.8	149.60	55	129.8	200%	
2.11.05.101.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3"	1	0	1	2	200.00	1	3	300%	
2.11.05.101.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	25	0	10	10	100.00	15	25	100%	

2.11.06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Prosentase peningkatan ketaatan usaha/ kegiatan	17	0	16	40.31	251.94	15	55.31	325%
2.11.06.101	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Prosentase pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha/ kegiatan	100	0	100	100	100.00	60	160	160%
2.11.06.101.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	jumlah kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1	0	1	1	100.00	1	2	200%
2.11.06.101.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	1	0	1	1	100.00	1	2	200%
2.11.06.101.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	300	0	200	708	354.00	250	958	319%
2.11.06.101.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	1	0	1	1	100.00	1	2	200%
2.11.07	Program pengakuan keberadaan Masyarakat hukum adat (MHA), kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat hukum adat (MHA), kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui"	100	0	100	100	100.00	100	200	200%

2.11.07.101	Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat hukum adat (MHA), kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	3	0	3	3	100.00	3	6	200%
2.11.07.101.01	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	jumlah kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	6	0	6	6	100.00	6	12	200%
2.11.07.102	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Kegiatan untuk Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	6	0	6	6	100.00	6	12	200%
2.11.07.102.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Kegiatan untuk Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	6	0	6	6	100.00	6	12	200%
2.11.08	Program peningkatan pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup untuk masyarakat	Persentase peserta yang meningkat pengetahuan dan kemampuannya mengenai pengelolaan lingkungan hidup	60	0	45	50	111.11	50	100	167%
2.11.08.101	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	6	0	3	6	200.00	6	12	200%

Renja DLH Prov. Jatim Tahun 2023

2.11.08.101.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	jumlah kegiatan untuk Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	6	0	3	5	166.67	6	11	183%
2.11.08.101.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	6	0	3	2	66.67	6	8	133%
2.11.08.101.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	5	0	3	1	33.33	5	6	120%
02.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	persentase peningkatan perolehan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	7	0	5	5	100.00	10,5	-	-
2.11.09.101	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	156	0	166	176	106.02	136	312	200%
2.11.09.101.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	156	0	166	184	110.84	136	320	205%
02.11.10	Program penanganan pengaduan Lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	96	100	96	100	104.17	100	300	313%
2.11.101.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan"	48	0	48	23	47.92	48	71	148%
2.11.10.101.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	50	0	50	23	46.00	100	123	246%

2.11.10.101.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/ atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	80	0	60	50	83.33	62	112	140%
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang dikelola	97	96.2	96.2	96.2	100.00	96,3	-	-
2.11.11.1.01	Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/ TPST regional	Persentase Sampah padat yang dikelola	99	0	98	98	100.00	96,3	-	-
2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen perencanaan, kebijakan dan teknis penanganan sampah yang disusun	1	0	1	2	200.00	1	3	300%
2.11.11.1.01.02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Persentase Pemrosesan Akhir di TPA/TPST	96	0	5	5	100.00	1	6	6%
2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Persentase Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST	40	0	25	25	100.00	0	25	63%
2.11.11.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	10	0	2	2	100.00	10	12	120%
2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	8	0	5	5	100.00	6	11	138%
2.11.11.1.01.06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah kegiatan koordinasi Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	6	0	5	5	100.00	5	10	167%
2.11.11.1.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang disediakan	1	0	2	2	100.00	1	3	300%

Pada Tahun 2021 terdapat 11 (sebelas) program, dari program yang dijalankan terdapat program/kegiatan yang realisasinya di bawah target yang telah ditetapkan. Program/kegiatan yang realisasinya dibawah target yang ditetapkan yaitu :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Provinsi dengan Indikator Persentase indikator program yang tercapai terealisasi sebesar 86,67 % dari target yang ditetapkan sebesar 90 % ;Hal Ini disebabkan akibat ; 1.) kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah pada sub kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai dengan indicator presentase Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai ditargetkan sebesar 100 % terealisasi 90 % ; 2.) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan indicator kinerja jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi yang ditargetkan sebesar 25 Paket terealisasi 20 paket.; 3.) kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan indicator Presentase Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang ditargetkan 100% terealisasi 95 % . Hal ini dikarenakan pada sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau dengan indicator kinerja jumlah jasa yang ditargetkan sebesar 30 jasa terealisasi 20 jasa;
2. Program perencanaan lingkungan hidup pada sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi dengan indicator Jumlah kegiatan penyusunan dan penetapan RPPLH provinsi yang ditargetkan 2 kegiatan terealisasi 1 kegiatan;
3. Program Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati pada sub kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di luar kawasan Hutan dengan indicator Jumlah Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di luar kawasan Hutan yang ditargetkan 12 kegiatan terealisasi 4 kegiatan;
4. Program peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup dan masyarakat pada sub kegiatan, 1.) Pendampingan gerakan peduli lingkungan dengan indicator jumlah kegiatan pendampingan gerakan peduli lingkungan yang ditargetkan 3 kegiatan terealisasi 2 kegiatan dan 2.) penyelenggaraan Penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah provinsi dengan indicator jumlah kegiatan Penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah provinsi yang ditargetkan 3 kegiatan terealisasi 1 kegiatan;

- 5) Program penanganan pengaduan lingkungan hidup pada sub kegiatan, 1.) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan Indikator Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan terealisasi 23 pengaduan dari target yang ditetapkan sebanyak 48 pengaduan dan 2.) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi dengan indicator jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sebanyak 23 jumlah pengaduan dari target 50 jumlah pengaduan yang ditargetkan.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2021 berisi Target Program dan kegiatan renja Tahun 2021 yang telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Indikator kinerja utama dalam implementasi suatu kebijakan menjadi penting sebagai tolok ukur keberhasilan. Di samping itu, adanya indikator kinerja utama memungkinkan untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala pada saat diimplementasikan, sehingga ketika terdapat *output* dan *outcome* yang diukur tidak tercapai sesuai keinginan, maka dapat dilakukan analisis untuk merumuskan kembali hal-hal yang belum terdeteksi sebelumnya.

Penetapan indikator kinerja utama merupakan tekad dan janji dalam rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang akan dicapai. Dengan demikian penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya. Selain itu, penetapan indikator kinerja utama juga merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil. Dengan kata lain, upaya dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Realisasi kinerja DLH Provinsi Jawa Timur secara singkat dapat direfleksikan melalui penyajian data rekapitulasi kinerja bidang lingkungan hidup pada Tabel II.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel II. 2. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	6	7			9				10	11	
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	-	-	66.74 - 67.10	48.50	48.56	53,73	56,13	53,57	-	-	58,66	58,66	-
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	-	53.95 - 54.92	83.32	83.38	83,94	84,59	83,68	-	-	85,04	85,89	-
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	-	-	83.71 - 83.90	46.00	46.00	47,50	63,72	47,36	-	-	48.86	48.86	-
4.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	-	-	63.61 - 63.64	60.95	60.96	82.71	-	82,46			83.53	84.37	

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kondisi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur, permasalahan lingkungan hidup agar mendapat perhatian dan penyelesaian berdasarkan tugas dan fungsi DLH Provinsi Jawa Timur, antara lain:

Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
Indeks Kualitas Air (IKA) masuk Kategori kurang	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	a. Kesadaran masyarakat dan pelaku industri didalam pengelolaan limbah yang dihasilkan masih rendah sehingga terjadi pencemaran air; Tingginya alih fungsi lahan terutama lahan produktif diwilayah tangkapan air yang dijadikan perumahan, perindustrian dan tanaman semusim;
terjadinya penurunan Indek Kualitas Tutupan Lahan	Rendahnya kesadaran dan ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pemenuhan kewajiban	a. Banyaknya usaha/ kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup b. Masih rendahnya kesadaran dalam pemenuhan ketentuan yang terdapat didalam dokumen lingkungan hidup; c. Penegakan hukum lingkungan yang belum terpadu antar sektor yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum;
	Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional (Data)	a. Tidak sebandingnya volume sampah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA. b. Pengelolaan TPA yang belum optimal

IKLH merupakan suatu bentuk penilaian yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Penetapan IKLH sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Timur berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan tentang kondisi lingkungan hidup di Jawa Timur sebagai bahan untuk evaluasi terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan dan bentuk pertanggungjawaban tentang pencapaian target program-program Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Nilai-nilai indeks yang ada, merupakan hasil Perhitungan IKLH berdasarkan Perhitungan IKLH Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 mengacu pada PERMENLHK No. 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dimana terdapat penambahan 1 Komponen perhitungan IKLH yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2021 sebesar 68,49 masuk dalam kategori Sedang . Dengan klasifikasi atau kategori IKLH, antara lain:

KATEGORI	NILAI IKLH	NILAI IKA	NILAI IKU	NILAI IKL	NILAI IKAL
Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$				
Baik	$70 \leq x < 90$	$70 \leq x < 90$	$70 \leq x < 90$	70 - 80	$70 \leq x < 90$
Sedang	$50 \leq x < 70$	$50 \leq x < 70$	$50 \leq x < 70$	60 - 70	$50 \leq x < 70$
Kurang	$25 \leq x < 50$	$25 \leq x < 50$	$25 \leq x < 50$	50 - 60	$25 \leq x < 50$
Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$	$0 \leq x < 25$	$0 \leq x < 25$	40 - 50	$0 \leq x < 25$

Lebih detail capaian IKA, IKU, dan ITL Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2021 tercantum pada Tabel II.2.1 sebagai berikut.

Tabel II. 2.1 Nilai IKLH, IKA, IKU, IKL dan IKAL Tahun 2015-2021

Indikator	Nilai Indeks Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,69	66,81	66,29	66,36	67,10	67,70	68,49
Indeks Kualitas Air (IKA)	52,51	50,75	52,77	52,69	56,13	56,13	57,53
Indeks Kualitas Udara (IKU)	92,09	90,09	85,49	83,50	83,32	83,32	83,67
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	64,01	61,40	62,02	63,56	63,16	63,16	47,36
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	-	-	-	-	-	-	82,46

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2021 sebesar 47,36 mengalami penurunan dibandingkan dengan IKTL tahun 2020 (63,56). Pada perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) terdapat perbedaan jumlah komponen/parameter perhitungan antara tahun 2020 dengan tahun 2021 yang dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

NO.	KOMPONEN / PARAMETER PERHITUNGAN IKL	
	2020	2021
1	Tutupan Hutan	Tutupan Hutan
a	Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Lahan Kering Primer
b	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Lahan Kering Sekunder
c	Hutan Mangrove Primer	Hutan Mangrove Primer
d	Hutan Mangrove Sekunder	Hutan Mangrove Sekunder
e	Hutan Tanaman	Hutan Tanaman
2	Tutupan Non Hutan	Tutupan Non Hutan
a	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)
b	Belukar	<i>Kebun Raya</i>
c	Belukar Rawa	<i>Taman Kehati</i>
d	Savana/Padang rumput	<i>Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)</i>
e	Perkebunan/Kebun Campuran	-

*Catatan:

1. Pada Tahun 2020 data RTH merupakan data Provinsi yang bersumber dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
2. Pada Tahun 2021, data RTH merupakan agregasi data Kabupaten/Kota;
3. Data Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan data Kabupaten/Kota secara spasial yang selanjutnya akan diverifikasi oleh KLHK melalui citra satelit.

Berdasarkan tabel diatas, pada perhitungan IKL untuk parameter Luasan Tutupan Hutan antara tahun 2020 dan tahun 2021 tidak mengalami perubahan jumlah parameter. Sedangkan untuk parameter Luasan Tutupan Non Hutan, terdapat perubahan dimana Luasan Kebun Raya, Taman Kehati, Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) ditambahkan kedalam parameter perhitungan Luasan Tutupan Non Hutan dan untuk parameter Luasan Belukar, Belukar Rawa, Savana/Padang Rumput dan Perkebunan tidak termasuk dalam parameter perhitungan Luasan Tutupan Non Hutan.

Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2019, dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami peningkatan yang sangat signifikan signifikan. Pada tahun 2018 sebesar 52,69 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 56,13. Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 53,37 yang termasuk pada kategori Sedang. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021, nilai *Total Suspended Solid (TSS)* sebesar 136,712 mg/L jauh melebihi target yang ditetapkan yaitu 11,08 mg/L. Nilai TSS melebihi target diperkirakan karena faktor perubahan pola cuaca dan

perubahan pola tata guna lahan di sisi tengah dan hilir daripada sumber air/ sungai. Periode musim penghujan yang pendek cenderung menghasilkan curah hujan yang sangat tinggi dibanding musim penghujan yang normal. Curah hujan yang sangat tinggi ini dapat berakibat pada mudah terkikisnya lapisan tanah yang limpasannya akan mengalir ke sungai-sungai sekitar dan menjadi endapan yang sifatnya merupakan polutan bagi sungai. Begitu juga dengan perubahan tata guna lahan yang masif terjadi, terutama dijadikan lahan pertanian maupun pemukiman yang bersifat mengganggu kesetimbangan neraca air di permukaan tanah antara yang dialirkan maupun yang meresap ke dalam tanah. Kebijakan tata ruang yang tidak memperhatikan aspek lingkungan bahkan dapat menyebabkan bencana alam jika tidak ditangani secara serius. Nilai *Echerecia coli* tahun 2021 adalah 5176,29 MPN/100ml, jauh melebihi target yang ditetapkan yaitu 1480,375 MPN/100ml. E.coli adalah bakteri yang merupakan sub kelompok dari kelompok fecal coliform. Adanya bakteri E.coli menunjukkan adanya kontaminasi tinja/feses manusia. Bakteri ini bersifat pathogen dan berbahaya untuk manusia karena menyebabkan timbulnya penyakit mematikan seperti gastroenteritis. Menurunnya kualitas air juga dikarenakan konsentrasi *Echerecia coli* sebesar 30.105,4 MPN/100ml, jauh melebihi target yaitu 2242,96 MPN/100ml. Tingginya total coli yang tinggi menunjukkan tingginya pencemaran akibat bahan organik. Total coli yang tinggi disebabkan karena adanya resapan langsung, baik dari air limbah domestik maupun air limbah dari peternakan dan pertanian di daerah yang belum terlayani pengolahan air limbah domestik dengan baik, sehingga merembes langsung ke sumber-sumber air sekitar daerah yang terpapar.

Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Jawa Timur sebesar sebesar 83.67 yang termasuk pada kategori Baik. Namun kualitas udara dari parameter Nitrogen Dioxide (NO₂) tahun 2021 adalah 12,05 ppm dan lebih besar dari target (8,085 ppm). Nilai NO₂ tahun 2021 ini tinggi dikarenakan telah terjadi peningkatan polusi dari industri dan meningkatnya mobilisasi transportasi.

Pencapaian indikator kinerja utama Perangkat daerah dikontribusikan dari sasaran dan target yang direncanakan. Sasaran kinerja adalah tingkat target kinerja yang dinyatakan sebagai tujuan nyata yang terukur, di mana capaian aktual dapat dibandingkan, termasuk tujuan yang dinyatakan sebagai standar kuantitatif, nilai, atau tingkat yang telah dicapai pada tahun 2021 dijelaskan pada Tabel II.2.1 pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021.

Tabel II.2.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
Terkendalinya Pencemaran Air di Wilayah Sungai (WS) Strategis dan Udara serta kerusakan Lahan	Konsentrasi Beban Pencemaran Air untuk parameter:			
	BOD (mg/l)	7,2	6,38	112,83
	TSS (mg/l)	11,08	136,71	8,10
	E – Coli (MPN/100ml)	1480,375	5176,29	28,60
	Total Coli (MPN/100ml)	2242,96	30105,40	7,45
Meningkatnya Kualitas Udara Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian)	Kualitas Udara Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian) parameter:			
	SO ₂ ppm	17,65	9,98	176,85
	NO ₂ ppm	8,085	12,05	67,10
Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah dan Limbah B3	Persentase Sampah yang dikelola (%)	96,2	96,20	100
	Persentase Limbah B3 yang dikelola (%)	63,1	74,82	118,57
	Persentase usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap perundang – undangan lingkungan hidup (%)	16	17,86	111,61
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur	81,19	83,2	102,00

Berdasarkan Tabel II.2.1, terdapat 10 indikator kinerja DLH Prov. Jatim tahun 2021. Beberapa indikator akan mencapai target apabila sama dengan target atau lebih rendah dari target. Indikator yang dimaksud antara lain: BOD, TSS, *E.coli*, total coli, SO₂, dan NO₂. Lain halnya dengan 4 indikator lainnya. Indikator Persentase Sampah yang dikelola, indikator Persentase Limbah B3 yang dikelola, indikator Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap perundang – undangan lingkungan hidup, serta indikator nilai SAKIP DLH Prov. Jatim ini berhasil apabila sama atau melebihi target yang ditentukan.

Konsentrasi beban pencemaran air dipengaruhi oleh parameter : 1.) *Biological Oxygen Demand* (BOD) merupakan salah satu indikator yang menjadi salah satu parameter perhitungan indeks kualitas air (IKA). Tahun 2021 nilai BOD adalah 6,381 mg/L. nilai ini mencapai target karena lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 7,2 mg/L. Tercapainya nilai BOD ini menjadi keberhasilan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Timur. 2.) Sebagaimana indikator BOD, indikator *Total Suspended Solid* (TSS) memenuhi apabila lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Tahun 2021, nilai TSS sebesar 136,712 mg/L jauh melebihi target yang ditetapkan yaitu 11,08 mg/L. Nilai TSS melebihi target diperkirakan karena faktor perubahan pola cuaca dan perubahan pola tata guna lahan di sisi tengah dan hilir daripada sumber air/sungai. Periode musim penghujan yang pendek cenderung menghasilkan curah hujan yang sangat tinggi dibanding musim penghujan yang normal. Curah hujan yang sangat tinggi ini dapat berakibat pada mudah terkikisnya lapisan tanah yang limpasannya akan mengalir ke sungai-sungai sekitar dan menjadi endapan yang sifatnya merupakan polutan bagi sungai. Begitu juga dengan perubahan tata guna lahan yang masif terjadi, terutama dijadikan lahan pertanian maupun pemukiman yang bersifat mengganggu kesetimbangan neraca air di permukaan tanah antara yang dialirkan maupun yang meresap ke dalam tanah. Kebijakan tata ruang yang tidak memperhatikan aspek lingkungan bahkan dapat menyebabkan bencana alam jika tidak ditangani secara serius. 3.) *Escherichia coli* (*E. coli*) adalah bakteri yang merupakan sub kelompok dari kelompok fecal coliform. Adanya bakteri *E.coli* menunjukkan adanya kontaminasi tinja/feses manusia. Bakteri ini bersifat patogen dan berbahaya untuk manusia karena menyebabkan timbulnya penyakit mematikan seperti gastroenteritis. Indikator *E.coli* merupakan juga merupakan salah satu parameter perhitungan IKA. Nilai *E.coli* tahun 2021 adalah 5176,29 MPN/100ml, jauh melebihi target yang ditetapkan yaitu 1480,375 MPN/100ml . Total coli tahun 2021 adalah 30.105,4 MPN/100ml, jauh melebihi target yaitu 2242,96 MPN/100ml. Tingginya total coli yang tinggi menunjukkan tingginya pencemaran

akibat bahan organik. Total coli yang tinggi disebabkan karena adanya resapan langsung, baik dari air limbah domestik maupun air limbah dari peternakan dan pertanian di daerah yang belum terlayani pengolahan air limbah domestik dengan baik, sehingga merembes langsung ke sumber-sumber air sekitar daerah yang terpapar.

Kualitas Lingkungan Hidup selanjutnya dapat dipantau dari meningkatnya kualitas udara melalui parameter Nitrogen dioksida (NO_2) dan Sulfur Dioksida (SO_2). Nitrogen dioksida (NO_2) adalah gas beracun yang dihasilkan dari aktivitas pembakaran maupun proses biologis. Konsentrasi NO_2 di perkotaan lebih besar bila dibandingkan dengan pegunungan. Hal ini dikarenakan penghasil utama gas NO_2 adalah dari pembakaran terutama pembakaran mesin kendaraan bermotor, produksi energy dan pembuangan. Capaian kinerja untuk indikator NO_2 tahun 2021 adalah 12,05 ppm dan lebih besar dari target (8,085 ppm). Nilai NO_2 tahun 2021 ini tinggi dikarenakan telah terjadi peningkatan polusi dari industri dan meningkatnya mobilisasi transportasi. Sebagian besar emisi NO_x sebagai akibat dari kegiatan manusia adalah berasal dari pembakaran arang, minyak dan gas alam. Capaian kinerja untuk parameter SO_2 tahun 2021 sebesar 9,98 ppm. Capaian ini lebih rendah dari target yaitu 17,65 ppm. Makin rendah capaian maka makin baik. Tercapainya kinerja indikator SO_2 menunjukkan bahwa upaya pengendalian kualitas udara melalui kebijakan transportasi yang telah direkomendasikan atau bahkan telah diterapkan berhasil. Nilai SO_x atau SO_2 di udara sangat ditentukan oleh kualitas bahan bakar, khususnya kadar sulfur. Kemungkinan kebijakan perubahan bahan bakar dari premium ke pertalite/ pertamax (kualitas lebih tinggi) berdampak pada emisi SO_x di udara, baik yang dihasilkan dari sektor pembangkit listrik, industri, maupun lalu lintas.

Sasaran kinerja pada Indikator persentase sampah yang dikelola tahun 2021 adalah 96,2% dan ini telah mencapai target yang ditentukan. Indikator Persentase limbah B3 yang dikelola diperoleh dari jumlah timbulan limbah B3 yang dikelola dibandingkan dengan jumlah timbulan limbah B3 total tahun 2021. Capaian kinerja pada indikator ini tahun 2021 adalah 74,82% telah melebihi target yang ditentukan yaitu 63,1%. Selain Kinerja pengelolaan Limbah B3 dan Sampah yang di kelola, kinerja lainnya adalah mendorong usaha dan atau kegiatan untuk melaksanakan kegiatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan indicator presentase persentase usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap perundang – undangan lingkungan hidup . Indikator persentase usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap perundang – undangan lingkungan hidup tahun 2021 sebesar 17,86%. Capaian kinerja ini melebihi target yang ditentukan dan merupakan keberhasilan upaya pembinaan

usaha/kegiatan di Jawa Timur. Selain itu pembinaan usaha dan/atau kegiatan telah meningkatkan ketaatan dalam memenuhi dokumen perizinan lingkungan.

Perangkat daerah sebagai Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing Perangkat Daerah (PD). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selain itu, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah. Indikator nilai SAKIP DLH Prov. Jatim tahun 2021 merupakan hasil evaluasi SAKIP tahun 2020. Nilai SAKIP DLH Tahun 2021 tercapai 100% dengan nilai SAKIP sebesar 81,19. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan kajian kondisi pengelolaan lingkungan hidup dan potensi maupun isu strategis yang ada di provinsi Jawa Timur, dapat dirumuskan 5 (lima) isu pokok yang wajib mendapat perhatian bersama, yaitu:

1. Pengelolaan Sumber Daya Air

Permasalahan utama didalam upaya pengelolaan sumber daya air adalah permasalahan kuantitas air dan kualitas air yang semakin menurun, hal ini terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor, untuk penurunan kuantitas air disebabkan oleh:

- a. Ketersediaan air bervariasi menurut iklim
- b. Berubahnya fungsi daerah resapan menjadi daerah pemukiman dan industri
- c. Terganggunya fungsi kawasan sebagai penyimpan air (rawa, danau, situ, bendungan/dam)
- d. Terganggunya fungsi hutan sebagai kawasan lindung dan resapan
- e. Degradasi lahan akibat erosi dan longsor

f. Kesalahan dalam pengelolaan sempadan sungai dan lingkungan sungai, sedangkan menurunnya kualitas sumber daya air disebabkan oleh:

a) Tingkat pencemaran air.

Masalah limbah terutama di perkotaan selalu menjadi perhatian pemerintah namun sering luput dari pengawasan sebagian besar masyarakat. Potret sanitasi di Jawa Timur mulai dari tumpukan sampah di saluran drainase, buangan limbah industri yang tidak diolah dan dikelola, jamban di pinggir sungai bahkan pembuangan tinja secara liar di sungai adalah kenyataan yang masih ada di lapangan. Limbah domestic berasal dari hasil kegiatan rumah tangga yang dibuang langsung kedalam badan air tanpa melalui pengolahan. Demikian juga dengan limbah UMKM dari hasil kegiatan peternakan terutama di wilayah hulu Sungai Brantas yang membuang langsung limbahnya kedalam aliran sungai. Hal ini menyebabkan konsentrasi e – coli dan fecal coli meningkat dari tahun ketahun, yang menyebabkan kualitas air menjadi menurun. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah tahun 2021 menunjukkan beban pencemar paling besar di DAS Brantas adalah dari peternakan sapi mencapai 2.004,3 kg/hari. Sumber pencemar rumah tangga mendominasi beban pencemar yang ada di DAS Brantas sebesar 72%. Pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar sebagai sumber pencemar yaitu sekitar 10%.

Salah satu menjadi tantangan dalam menurunkan potensi limbah bagi industri UMKM adalah penerapan IPAL yang mudah, murah dan ramah lingkungan. Namun, tidak semua industri UMKM yang sudah memiliki IPAL pun mampu menjaga dan merawat IPAL mereka sendiri. Karena kinerja IPAL harus selalu termonitor dan terjaga agar buangan air limbah dapat memenuhi baku mutu. Di Jawa Timur, limbah domestik dan industri merupakan salah satu yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

b) Tingginya kadar sedimen akibat erosi;

c) Intrusi air laut

2. Pengelolaan Limbah B3

Potensi limbah B3 di Provinsi Jawa Timur sangat tinggi, dengan volume 170 juta ton/ tahun tentunya apabila tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi masalah bagi kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. Selama ini pengelolaan limbah B3 dilakukan di Cilengsi Jawa Barat, hal ini menyebabkan inefisiensi biaya pengolahan.

3. Pengelolaan hutan dan lahan

Dalam beberapa tahun terakhir penggunaan lahan tersebut mengalami perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan terjadi pada sumber daya lahan dan hutan. Alih fungsi lahan sawah tidak hanya pada daerah sub urban, akan tetapi telah masuk ke daerah pedesaan. Jika ditinjau dari aspek pertanian, meskipun terjadi perubahan penggunaan lahan sawah namun luas lahan pertanian yang ada masih mampu untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat Jawa Timur, namun demikian alih fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan.

Kerusakan ekosistem hutan telah memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kelangkaan sumber air/mata air. Kecenderungan ini telah tampak pada indikator menurunnya kualitas lingkungan hidup karena tekanan penduduk maupun bencana alam, dan pemanfaatan berlebihan sumber daya alam yang melampaui daya dukung lingkungannya. Kasus pembalakan hutan secara liar, erosi dan longsor, rusaknya habitat biota, menurunnya biodiversitas, banjir dan kekeringan, berubahnya iklim, kebakaran hutan, masalah dampak sosial ekonomi akibat eksploitasi dan sebagainya, telah menjadikan masalah laten yang memerlukan pendekatan holistik dan bertahap guna menyelesaikan atau menangani masalah alih fungsi lahan. Tercatat lahan kritis di Jawa Timur tahun 2018 seluas 194.342,91 Ha berada dalam kawasan hutan seluas 55.861,24 Ha dan luar kawasan hutan seluas 138.481,66 Ha. Sedangkan lahan sangat kritis seluas 179.534,78 Ha yang berada dalam kawasan hutan produksi seluas 153.670,7 Ha, kawasan hutan lindung seluas 22.388,32 Ha, kawasan hutan konservasi seluas 3.475,76 Ha, dan lahan sangat kritis luar kawasan hutan seluas 573.921,98 Ha.

4. Pengendalian Pencemaran Udara

Pencemaran lingkungan, baik dalam media lingkungan air, udara maupun tanah telah menjadikan kualitas lingkungan hidup menurun. Sumber-sumber pencemar dari industri, domestik, maupun yang lain harus dapat diatasi, dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. Dampak pencemaran yang bersifat akut atau kronis perlu diantisipasi, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Masalah pencemaran ini perlu ditangani secara sistemik, terencana, taat asas dan terus menerus. Upaya pemulihan dan pencegahan juga harus dimulai dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaannya, agar prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan.

5. Permasalahan Pengelolaan Kawasan Pesisir

Ada beberapa masalah yang terjadi dalam pembangunan di kawasan pesisir dan lautan di Indonesia antara lain:

a. Pencemaran

Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.

b. Kerusakan Fisik Habitat

Hal ini terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan rumput laut atau padang lamun. Kebanyakan rusaknya habitat di daerah pesisir adalah akibat aktivitas manusia seperti konversi hutan mangrove untuk kepentingan pemukiman, pembangunan infrastruktur, dan perikanan tambak. Ekosistem lainnya yang mengalami kerusakan cukup parah adalah ekosistem terumbu karang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rusaknya terumbu karang antara lain adalah:

- 1) penambangan batu karang untuk bahan bangunan, jalan, dan hiasan;
- 2) penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun, dan alat tangkap ikan tertentu;
- 3) pencemaran perairan oleh limbah industri, pertanian dan rumah tangga;
- 4) pengendapan dan peningkatan kekeruhan perairan akibat erosi tanah di darat, penggalian dan penambangan;
- 5) eksploitasi berlebihan sumber daya perikanan karang (Dahuri, 2001). Ekosistem padang lamun secara khusus rentan terhadap degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Beberapa aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem padang lamun adalah pengerukan dan pengurugan untuk pembangunan pemukiman pinggir laut, pelabuhan, industri dan saluran navigasi, serta pencemaran logam industri terutama logam berat, dan senyawa organoklorin, pembuangan sampah organik, pencemaran oleh limbah industri, pertanian, dan minyak (Bengen, 2000).

c. Eksploitasi sumber daya secara berlebihan

Ada beberapa sumber daya perikanan yang telah dieksploitir secara berlebihan (overfishing), termasuk udang, ikan demersal, palagis kecil, dan ikan karang. Menipisnya stok sumber daya tersebut, selain karena overfishing juga dipicu oleh aktivitas ekonomi yang baik secara langsung atau tidak merusak ekosistem dan lingkungan sehingga perkembangan sumber daya perikanan terganggu. Disamping itu, kurangnya apresiasi dan pengetahuan manusia untuk melakukan konservasi sumber daya perikanan, seperti udang, mangrove, terumbu karang, dan lain-lain.

d. Abrasi Pantai

Ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya abrasi pantai, yaitu proses alami (karena gerakan gelombang pada pantai terbuka), dan aktivitas manusia. Kegiatan manusia tersebut misalnya kegiatan penebangan hutan (HPH) atau pertanian di lahan atas yang tidak mengindahkan konsep konservasi telah menyebabkan erosi tanah dan kemudian sedimen tersebut dibawa ke aliran sungai serta diendapkan di kawasan pesisir. Aktivitas manusia lainnya adalah menebang atau merusak ekosistem mangrove di garis pantai baik untuk keperluan kayu, bahan baku arang, maupun dalam rangka pembuatan tambak.

e. Konversi Kawasan Lindung ke Penggunaan Lainnya

Dewasa ini banyak sekali terjadi pergeseran penggunaan lahan, misalnya dari lahan pertanian menjadi lahan industri, property, perkantoran, dan lain sebagainya yang terkadang kebijakan persegeran tersebut tanpa mempertimbangkan efek ekologi, tetapi hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi jangka pendek. Demikian juga halnya yang terjadi di kawasan pesisir, banyak terjadi pergeseran lahan pesisir dan bahkan kawasan lindung sekalipun menjadi lahan pemukiman, industri, pelabuhan, perikanan tambak, dan pariwisata. Akibatnya terjadi kerusakan ekosistem di sekitar pesisir, terutama ekosistem mangrove. Jika ekosistem mangrove rusak dan bahkan punah, maka hal yang akan terjadi adalah:

- 1) regenerasi stok ikan dan udang terancam;
- 2) terjadi pencemaran laut oleh bahan pencemar yang sebelumnya diikat oleh hutan mangrove;
- 3) pendangkalan perairan pantai;
- 4) erosi garis pantai dan intrusi garam.

II.4. Review terhadap RKPD

Renja dan RKPD merupakan 2 (dua) dokumen perencanaan yang saling terkait. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Bab I dokumen Renja ini, bahwa substansi RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Renja, sedangkan substansi Renja sendiri merupakan bahan masukan dalam penyusunan RKPD. Oleh karena itu, review terhadap RKPD menjadi proses yang penting dalam penyusunan Renja agar substansi dalam RKPD dan Renja menjadi harmonis dan sinergi.

Tabel II. 4. Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			95	34,000,267,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI			95	32,525,802,000	
				97					97		
				79					79		
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8	1,050,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8	700.694.000	
				4					4		
2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	400,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	280.000.000	
2.11.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	10,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	10,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	10,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	10,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	250,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	160,694,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4	320,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Surabaya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4	220,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
			Daerah					Daerah			
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12	27,274,013,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12	27,937,108,000	
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Surabaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	121	26,224,013,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Surabaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	121	26,997,108,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	700,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	685,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	50,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	40,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	50,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	40,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	35,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Surabaya	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	25,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Surabaya	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	20,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12	150,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12	100,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
2.11.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Surabaya	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	25,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Surabaya	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	20,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1	50,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1	35,000,000	
2.11.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Surabaya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Surabaya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021.

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	50,000,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	35,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Surabaya	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
X.XX.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12	1,493,554,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12	1,180,000,000	
2.11.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Surabaya	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	1,250,512,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Surabaya	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	1,100,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Surabaya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Surabaya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Surabaya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Surabaya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	52,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	15,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Surabaya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	191,042,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Surabaya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	65,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5	300,700,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5	180,000,000	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Surabaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	60,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Surabaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	35,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surabaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	65,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surabaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	40,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Surabaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	35,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Surabaya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	25,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Surabaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Surabaya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Surabaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	80,700,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Surabaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	45,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surabaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surabaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Surabaya	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0		Penyediaan Bahan/Material	Surabaya	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Surabaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	60,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Surabaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	35,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2	269,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2	125,000,000	
2.11.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Surabaya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Surabaya	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Surabaya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Surabaya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
1.11.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	Surabaya	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0		Pengadaan Alat Besar	Surabaya	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
1.11.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Surabaya	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Surabaya	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Surabaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0		Pengadaan Mebel	Surabaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Surabaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	184,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Surabaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	75,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Surabaya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Surabaya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Surabaya	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Surabaya	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Surabaya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Surabaya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Surabaya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Surabaya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Surabaya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	85,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Surabaya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	50,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	2,688,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	1,923,000,000	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surabaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surabaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	-	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Surabaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	438,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Surabaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	438,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
			yang Disediakan					yang Disediakan			
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surabaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	150,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surabaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	85,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Surabaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	2,100,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Surabaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1,400,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	875,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	445,000,000	

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Surabaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	235,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Surabaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	165,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Surabaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Surabaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.01.1.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Surabaya	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Surabaya	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Surabaya	Jumlah Mebel yang Dipelihara			Pemeliharaan Mebel	Surabaya	Jumlah Mebel yang Dipelihara			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Surabaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	90,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Surabaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	65,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
1.11.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Surabaya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Surabaya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Surabaya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Surabaya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Surabaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2	350,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Surabaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2	150,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
1.11.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Surabaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Surabaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Surabaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1	200,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Surabaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1	65,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		-	2	1,400,000,000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		-	2	1,060,000,000	
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Surabaya	-	25	670,000,000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Surabaya	-	25	500,000,000	
		Surabaya	-	30			Surabaya	-	30		

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Surabaya	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	1	378,000,000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Surabaya	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	1	280,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.02.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Surabaya	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1	292,000,000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Surabaya	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1	220,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			75	730,000,000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			75	560,000,000	
2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Surabaya	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1	202,000,000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Surabaya	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1	169,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Surabaya	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1	228,000,000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Surabaya	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1	169,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.02.1.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Surabaya	Jumlah Dokumen KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	75,000,000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Surabaya	Jumlah Dokumen KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	55,500,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.02.1.02.04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Surabaya	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1	225,000,000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Surabaya	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1	166,500,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN			12	2,975,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN			12	2,305,312,000	
				3					3		
				4					4		
				1.2					1.2		

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
	HIDUP					HIDUP					
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			65	1,000,000,000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			65	829.000,000	
			24						24		
			8						8		
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	97	800,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	97	681,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	3	200,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	3	148,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jawa Timur		8	1,064,204,000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jawa Timur		8	790,312,000	

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.03.1.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Malang, Mojokerto, Jombang, Sidoarjo	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	685,404,000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Malang, Mojokerto, Jombang, Sidoarjo	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	510,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.03.1.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jawa Timur	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	8	222,840,000	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jawa Timur	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	8	164,901.600	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.03.1.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jawa Timur	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	8	155,960,000	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jawa Timur	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	8	155,410,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jawa Timur		8	910,796,000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jawa Timur		8	686,000,000	
2.11.03.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan			Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.03.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	4	150,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	4	111,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.03.1.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	6	160,796,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	6	125,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.03.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	15	600,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	15	450,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.03.1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			15	1,254,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			15	927.960,000	

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jawa Timur		5	1,254,000,000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jawa Timur		5	927,960,000	
2.11.04.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1	354,000,000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1	261,960,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.04.1.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jawa Timur	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	27	250,000,000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jawa Timur	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	27	185,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.04.1.01.03	Pengelolaan Kebun Raya	Jawa Timur	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi			Pengelolaan Kebun Raya	Jawa Timur	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.04.1.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jawa Timur	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	5	200,000,000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jawa Timur	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	5	148,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.04.1.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jawa Timur	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jawa Timur	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.04.1.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jawa Timur	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	200	450,000,000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jawa Timur	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	200	333,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.04.1.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jawa Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jawa Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			63.3 100	527,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			63.3 100	391,000,000	

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			60	527,000,000	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			60	391,000,000	
2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jawa Timur	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	150,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jawa Timur	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	111,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	20	377,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	20	280,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			16	751,397,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			16	547,500,000	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jawa Timur		65	751,397,000	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jawa Timur		65	547,500,000	

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jawa Timur	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	65	283,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jawa Timur	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	65	210,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.06.1.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jawa Timur	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	5	75,000,000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jawa Timur	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	5	55,500,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jawa Timur	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	275	347,397,000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jawa Timur	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	275	250,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.06.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	46,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	32,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			100	200,000,000	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			100	100,000,000	

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jawa Timur		3	100,000,000	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jawa Timur		3	50,000,000	

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.07.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	3	100,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	3	50,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jawa Timur		6	100,000,000	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jawa Timur		6	50,000,000	
2.11.07.1.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	3	100,000,000	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	3	50,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jawa Timur		55	400,000,000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jawa Timur		55	293,000,000	
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jawa Timur		6	400,000,000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jawa Timur		6	293,000,000	

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.08.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Jawa Timur	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	6	200,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Jawa Timur	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	6	145,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jawa Timur	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6	100,000,000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jawa Timur	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6	74,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.08.1.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jawa Timur	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	200	100,000,000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jawa Timur	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	200	74,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.08.1.01.04	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jawa Timur	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jawa Timur	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			11	354,000,000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			11	260,000,000	
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jawa Timur		146	354,000,000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jawa Timur		146	260,000,000	

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jawa Timur	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	146	354,000,000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jawa Timur	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	146	260,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			100	500,000,000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			100	370,000,000	

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jawa Timur		48	500,000,000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jawa Timur		48	370,000,000	
2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jawa Timur	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti /Ditangani	12	250,000,000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jawa Timur	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti /Ditangani	12	185,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.10.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	12	250,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	12	185,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			96.5	1,769,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			96.5	1,257,000,000	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jawa Timur		99	1,769,000,000	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jawa Timur		99	1,257,000,000	

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	1	100,000,000	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	1	74,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.11.1.01.02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jawa Timur	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	0	-	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jawa Timur	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	0	-	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jawa Timur	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	0	-	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jawa Timur	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	0	-	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.11.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	10	50,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	10	37,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	7	463,400,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	7	300,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.11.1.01.06	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jawa Timur	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	10	62,820,000	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jawa Timur	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	10	46,000,000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.11.1.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jawa Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	10	1,092,780,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jawa Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	10	800.000.000	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jawa Timur	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen	1700	3,000,000,000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jawa Timur	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen	1700	2.247.387.000	

Kode Program / Kegiatan	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program / Kegiatan	Pagu Definitif	
			Mutu yang Dilaksanakan					Mutu yang Dilaksanakan			
TOTAL					47,130,664,000					42,284,961,000	

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Usulan yang ditampung berdasarkan Musrenbang RKPD terdapat 52 (Lima Puluh Dua) usulan yang diakomodir, seperti disajikan pada Tabel II.5 Usulan Kabupaten/ Kota Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023 yang di Akomodir. Sedangkan usulan yang tidak diakomodir sebanyak 4 (Empat) seperti disajikan pada Tabel II.5 Usulan Kabupaten/ Kota Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023 yang tidak di Akomodir.

Tabel II.5 Usulan Kabupaten/ Kota Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023 yang di Akomodir

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Hasil Verifikasi				Keterangan
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/ Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kab. Bojonegoro	Lingkungan Hidup		-	Jl. Dr Wahidin No. 40 Bojonegoro, Kab. Bojonegoro	-	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Akomodir untuk volume/target satuan dari pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
2.	Kab. Bondowoso	Lingkungan Hidup	Pelatihan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan/atau Pesisir	-	Kab. Bondowoso	-	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Diakomodir dengan bentuk bimtek dan untuk volume/target satuan dan visitasi dari pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
3.	Kab. Bondowoso	Lingkungan Hidup	Pembinaan Ecopesantren /Adiwiyata/Ka Ipataru	-	Kab. Bondowoso	-	Penghargaan lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/L embaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan	

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Hasil Verifikasi				Keterangan
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
									dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
4.	Kab. Jember	Lingkungan Hidup	Pembinaan Ecodesantren /Adiwiyata/Kalipataru	-	Kab. Jember	-	Penghargaan lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Diakomodir pelaksanaan kegiatan menyesuaikan ketersediaan anggaran
5.	Kab. Kediri	Lingkungan Hidup	Pembersihan Lahan Terkontaminasi	-	Desa Maesan kecamatan Mojo, desa wonorejotrisulo kec plosoklaten, desa ngreco kecamatan kandat	-	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Diakomodir pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kondisi lapangan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran
6.	Kab.Kediri	Lingkungan Hidup	Pelatihan Rehabilitasi	-	Kabupaten Kediri	-	Pengendalian Pencemaran	Pemulihan Pencemaran	Koordinasi dan	Diakomodir dengan bentuk bimtek.

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Hasil Verifikasi				Keterangan
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/ Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
			Kerusakan Lahan dan/atau Pesisir				dan Kerusakan Lingkungan Hidup	dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
7.	Kab.Kediri	Lingkungan Hidup	Pembinaan Komunitas Peduli Lingkungan DAS Kewenangan Provinsi	-	Kabupaten Kediri	-	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Diakomodir pelaksanaan kegiatan menyesuaikan ketersediaan anggaran
8.	Kab.Kediri	Lingkungan Hidup	Pembinaan Ecoresantren /Adiwiyata/Kalipataru	-	Kabupaten Kediri	-	Penghargaan lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Diakomodir pelaksanaan kegiatan menyesuaikan ketersediaan anggaran
9.	Kab. Lamongan	Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penyusunan	1 paket	Kab. Lamongan	-	Pengendalian Pencemaran	Pencegahan Pencemaran	Koordinasi, Sinkronisasi	Diakomodir dalam bentuk kegiatan

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Hasil Verifikasi				Keterangan
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/ Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
			Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca				dan Kerusakan Lingkungan Hidup	dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Bimtek / Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Teknis Pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
10.	Kab. Lamongan	Lingkungan Hidup	Pembinaan Ecopesantren /Adiwiyata/Kalipataru	-	Kab. Lamongan	-	Penghargaan lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tekrus pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi sarana prasarana akan dikoodinasikan dengan bidang terkait dengan ketersediaan anggaran
11.	Kab. Lumajang	Lingkungan Hidup	Pembinaan Ecopesantren /Adiwiyata/Kalipataru	-	PP Asy - Saryfi, PP Anur Tempeh, PP Darun Najah, PP Manarul Quran, PP Alfauzan	-	Penghargaan lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi	Diakomodir pelaksanaan kegiatan menyesuaikan ketersediaan anggaran

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Hasil Verifikasi				Keterangan
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/ Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Labruk, Kab. Lumajang				dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
12.	Kab. Lumajang	Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penyusunan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	1 paket	Kab. Lumajang	-	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Diakomodir dengan bentuk bimtek. Pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
13.	Kab. Lumajang	Lingkungan Hidup	Pembinaan Komunitas Peduli Lingkungan DAS Kewenangan Provinsi	-	Desa Sumberpetung, Desa Buwek, Kab. Lumajang	-	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Diakomodir pelaksanaan kegiatan menyesuaikan ketersediaan anggaran
14	Kab. Magetan	Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penyusunan Inventarisasi Emisi Gas	1 paket	Kab. Magetan	-	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Diakomodir dengan bentuk bimtek. Pelaksanaan disesuaikan dengan

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Hasil Verifikasi				Keterangan
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/ Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
			Rumah Kaca				Hidup	Lingkungan Hidup	Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	ketersediaan anggaran.
15.	Kab. Magetan	Lingkungan Hidup	Pelatihan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan/atau Pesisir	-	Kab. Magetan	-	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Diakomodir dengan bentuk bimtek. Pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
16.	Kab. Malang	Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penyusunan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	1 paket	Kab. Malang	-	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Diakomodir dengan bentuk bimtek. Pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
17.	Kab. Malang	Lingkungan Hidup	Pembinaan Ecopesantren /Adiwiyata/Kalpataru	1 paket	PP. Subulas Salam Jl. Pesantren, Selobekiti, Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten	-	Penghargaan lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/	Diakomodir pelaksanaan kegiatan menyesuaikan ketersediaan anggaran

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Hasil Verifikasi				Keterangan
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Malang, Kab. Malang				Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
18.	Kab. Malang	Lingkungan Hidup	Pembinaan Ecopesantren /Adiwiyata/Kalipataru	1 paket	"PP. Al-Aziz Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 15 Banjarpayoman, RT.03/RW.04 Amadanom Barat, Amadanom, Kec. Dampit, Kab. Malang.", Kab. Malang	-	Penghargaan lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Diakomodir pelaksanaan kegiatan menyesuaikan ketersediaan anggaran
19.	Kab. Malang	Lingkungan Hidup	Pembinaan Ecopesantren /Adiwiyata/Kalipataru	1 paket	"PP. Assalam Jl. Raya Sukosari, Kec. Bantur, Malang", Kab. Malang	-	Penghargaan lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan	Diakomodir pelaksanaan kegiatan menyesuaikan ketersediaan anggaran

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Hasil Verifikasi				Keterangan
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/ Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
									dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
20	Kab. Mojokerto	Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penyusunan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	1 paket	Kab. Mojokerto	-	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Diakomodir dengan bentuk bimtek. Pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
21.	Kabupaten Ngawi	Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penyusunan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	1 paket	Ds. Danguk (Karangjati), Ds. Pandansari (Sine), Ds. Ngmpuro (Pangkur), Ds. Sambirejo (Mantingan), Ds. Karangasri (Ngawi), Kab. Ngawi	1 paket	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Akomodir. Kegiatan difokuskan pada kegiatan pembinaan. Pemberian sarana dan prasarana (belanja modal) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta ketentuan yang berlaku
22.	Kabupaten Ngawi	Lingkungan Hidup	Pendampingan Pembersihan Lahan Terkontaminasi	1 paket	Lahan sekitar PG Soedono Geneng, PT Bumi Subur	1 paket	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan	Diakomodir dalam bentuk kegiatan Bimtek / Workshop Penyusunan Rencana

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Hasil Verifikasi				Keterangan
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/ Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
			Limbah		Sentosa (Geneng, PT Surya Bambu Timur (Ngawi), Kab. Ngawi		Hidup	Lingkungan Hidup	Unsur Pencemar	Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Teknis Pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
23.	Kabupaten Ngawi	Lingkungan Hidup	Pelatihan SDM Lingkungan Hidup 18 orang	1 paket	Kabupaten Ngawi	-	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Diakomodir dalam bentuk kegiatan Bimtek / Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Teknis Pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
24.	Kabupaten Ngawi	Lingkungan Hidup	Sosialisasi GPBLHS bagi sekolah (2 kali x 50 sekolah)	1 paket	Kabupaten Ngawi	-	Penghargaan lingkungan hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Diakomodir dalam bentuk kegiatan Bimtek / Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Teknis Pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Hasil Verifikasi				Keterangan
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/ Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
25.	Kabupaten Ngawi	Lingkungan Hidup	Pembinaan Penyusunan dokumen administrasi Calon Sekolah Adiwiyata (30 sekolah)	1 paket	Kabupaten Ngawi	-	Penghargaan lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/L embaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Diakomodir dalam bentuk kegiatan Bimtek / Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Teknis Pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
26.	Kabupaten Ngawi	Lingkungan Hidup	Pembinaan Penyusunan dokumen administrasi Calon Sekolah Adiwiyata	(30 sekolah)	Kabupaten Ngawi	-	Penghargaan lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/L embaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Diakomodir dalam bentuk kegiatan Bimtek / Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Teknis Pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
27.	Kabupaten Ngawi	Lingkungan Hidup	Pelatihan Pengelolaan sampah di	(30 pesantren x 3 kali)	Kabupaten Ngawi	-	Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Diakomodir dalam bentuk kegiatan Bimtek / Workshop

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Hasil Verifikasi				Keterangan
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/ Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
			Pondok Pesantren					Regional	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Teknis Pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
28.	Kabupaten Ngawi	Lingkungan Hidup	Pelatihan Konservasi Air di Pondok Pesantren	(30 pesantren x 3 kali)	Kabupaten Ngawi	-	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Diakomodir dalam bentuk kegiatan Bimtek / Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Teknis Pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
29.	Kabupaten Ngawi	Lingkungan Hidup	Pengadaan Tempat Pemilahan Sampah untuk Ponpes	1 paket	Ponpes Al Hidayah Kecamatan Kendal, Kab. Ngawi	-	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Akomodir. Kegiatan difokuskan pada kegiatan pembinaan. Pemberian sarana dan prasarana (belanja modal) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta ketentuan yang berlaku
30.	Kabupaten Ngawi	Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penyusunan Inventarisasi Emisi Gas	1 paket	Ds. Danguk (Karangjati), Ds. Pandansari	-	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Akomodir. Kegiatan difokuskan pada kegiatan pembinaan. Pemberian sarana dan

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Hasil Verifikasi				Keterangan
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
			Rumah Kaca		(Sine), Ds. Ngmpro (Pangkur), Ds. Sambirejo (Mantingan), Ds. Karangasri (Ngawi), Kab. Ngawi		Hidup	Lingkungan Hidup	Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	prasarana (belanja modal) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta ketentuan yang berlaku
31.	Kab. pasuruan	Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penyusunan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	1 paket	Kab. pasuruan	-	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Akomodir dengan mengundang PD terkait pada acara bimtek dan pelaksanaan kegiatan disesuaikan ketersediaan anggaran
32.	Kab. pasuruan	Lingkungan Hidup	Pelatihan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan/atau Pesisir	-	Desa Jeruk Purut dan Desa BulusariKec. Gempol; Desa Puspo Kecamatan Puspo; Wilayah Pesisir Desa patuguran Kec., Rejoso, Kab.	-	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Akomodir untuk sasaran lokasi dan volume/target satuan dari pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Hasil Verifikasi				Keterangan
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Pasuruan					
33.	Kab. pasuruan	Lingkungan Hidup	Pembinaan Ecopasantren /Adiwiyata/Kalipataru	1 paket	Kab. pasuruan	-	Penghargaan lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Diakomodir pelaksanaan kegiatan menyesuaikan ketersediaan anggaran
34.	Kab. Probolinggo	Lingkungan Hidup	Pelatihan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan/atau Pesisir	-	Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan dengan 30 peserta, Kab. Probolinggo	-	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Diakomodir dengan bentuk bimtek. Pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
35.	Kab. Probolinggo	Lingkungan Hidup	Pembinaan Ecopasantren /Adiwiyata/Kalipataru	1 paket	Nurul Jadid Paiton, Kab. Probolinggo	-	Penghargaan lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	Diakomodir pelaksanaan kegiatan menyesuaikan ketersediaan anggaran

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Hasil Verifikasi				Keterangan
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/ Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
									Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
36.	Kab. Probolinggo	Lingkungan Hidup	Pembinaan Ecosantren /Adiwiyata/Kalipatru	1 paket	60 Kepala sekolah Adiwiyata, Kab. Probolinggo	-	Penghargaan lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Diakomodir pelaksanaan kegiatan menyesuaikan ketersediaan anggaran
37.	Kabupaten Sampang	Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penyusunan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	1 paket	Kabupaten Sampang	1 paket	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan	Diakomodir dalam bentuk kegiatan Bimtek / Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Teknis Pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Hasil Verifikasi				Keterangan
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
									Iklm	
38.	Kabupaten Sampang	Lingkungan Hidup	Pembinaan Ecodesantren/A diwiyata/Kalpat aru	1 paket	Kabupaten Sampang	1 paket	Penghargaan lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/L embaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Diakomodir dalam bentuk kegiatan Bimtek / Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Teknis Pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran
39.	Kabupaten Sampang	Lingkungan Hidup	Pembinaan Komunitas Peduli Lingkungan DAS Kewenangan Provinsi	1 paket	Kabupaten Sampang	1 paket	Penghargaan lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/L embaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Diakomodir dalam bentuk kegiatan Bimtek / Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Teknis Pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan Anggaran

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Hasil Verifikasi				Keterangan
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/ Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
40.	Kab. Sidoarjo	Lingkungan Hidup	Alasan (adiwiyata) Alasan (adiwiyata) 1. Sarpras tempat sampah terpilih 3 dan komposter sangat dibutuhkan oleh calon sekolah adiwiyata tetapi kita tidak ada anggaran untuk memberikan 2.bimbingan teknis calon sekolah adiwiyata provinsi sudah 3 tahun tidak pernah diadakan	1 paket	Kab. Sidoarjo	1 paket	Penghargaan lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/L embaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Akomodir. Pelaksanaan lebih diprioritaskan pada kegiatan pembinaan dan teknis pelaksanaan pembinaan serta bantuan sarana prasarana disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
41.	Kab. Sidoarjo	Lingkungan Hidup	Alasan (eco pesantren) 1. Merupakan program gubernu jawa timur yg harus diikuti oleh seluruh kab/kota di jawa timur sehingga	1 paket	Kab. Sidoarjo	1 paket	Penghargaan lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/L embaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam	Akomodir. Pelaksanaan lebih diprioritaskan pada kegiatan pembinaan dan teknis pelaksanaan pembinaan serta bantuan sarana prasarana disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Hasil Verifikasi				Keterangan
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/ Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
			diperlukan bimbingan teknis dari provinsi 2. Sarpras tempat sampah terpilah 3 dan komposter dibutuhkan unt pengolahan sampah di pesantren tetapi kita sebagai kab pengusul tidak bisa memberikan sarana prasarana						Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
42.	Kab. Sumenep	Lingkungan Hidup	Pembinaan Ecodesantren/A diwiyata/Kalpat aru	1 paket	Ponpes Al Karimiyah Desa Beraji Kec. Gapura, Ponpes Aqidah Usymuni Desa Pandian Kec. Kota Sumenep, Ponpes Nasyrul Ulum Desa	1 paket	Penghargaan lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/L embaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Diakomodir dengan bentuk bimtek. Pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Hasil Verifikasi				Keterangan
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/ Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Aengdake Kec. Bluto, Kab. Sumenep				Hidup	
43.	Kab. Trenggalek	Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penyusunan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	1 paket	Kab. Trenggalek	-	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Diakomodir dengan bentuk bimtek. Pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
44.	Kab. Trenggalek	Lingkungan Hidup	Pelatihan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan/atau Pesisir	-	wilayah pesisir pantai di Ds. Wonocoyo Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	-	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Diakomodir untuk sasaran lokasi dan volume/target satuan dari pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
	Kab. Trenggalek	Lingkungan Hidup	Pelatihan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan/atau Pesisir	-	wilayah embung nglentreng Ds. Sumberdad i Kec. Trenggalek, Kab.	-	Pengelolaan KEanekaragama n Hayati	Pengelolaan Keanekaragam an Hayati Provinsi	Pengembang an Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaraga man Hayati	Diakomodir untuk sasaran lokasi dan volume/target satuan dari pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Hasil Verifikasi				Keterangan
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
					Trenggalek					
45.	Kab. Trenggalek	Lingkungan Hidup	Pelatihan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan/atau Pesisir	-	Dusun Tugu RT 31 dan Dusun Nglayur RT 43, 44 dan 47 Desa Sukorejo Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek	-	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Diakomodir untuk sasaran lokasi dan volume/target satuan dari pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
46.	Kab. Trenggalek	Lingkungan Hidup	Pelatihan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan/atau Pesisir	-	Dusun Pelem RT17 RW 04 Desa Sumberbening Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	-	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Diakomodir untuk sasaran lokasi dan volume/target satuan dari pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
47.	Kab. Trenggalek	Lingkungan Hidup	Pelatihan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan/atau Pesisir	-	Ds. Terbis Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	-	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Diakomodir untuk sasaran lokasi dan volume/target satuan dari pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Hasil Verifikasi				Keterangan
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/ Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
48.	Kota Mojokerto	Lingkungan Hidup	Pembinaan Ecodesantren/A diwiyata/Kalpat aru	1 paket	Jl. Raden Wijaya No. 19, Kelurahan Kranggan, Kota Mojokerto	1 paket	Penghargaan lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/L embaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Diakomodir pelaksanaan kegiatan menyesuaikan ketersediaan anggaran
49.	Kota Probolinggo	Lingkungan Hidup	Pembinaan Ecodesantren/A diwiyata/Kalpat aru	1 paket	DLH Kota Probolinggo, Kota Probolinggo	1 paket	Penghargaan lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/L embaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Diakomodir dengan bentuk bimtek. Pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
50.	Kota Probolinggo	Lingkungan Hidup	Pembinaan Ecodesantren/A diwiyata/Kalpat	1 paket	173 sekolah se Kota Probolinggo,	1 paket	Penghargaan lingkungan Hidup Untuk	Pemberian Penghargaan Lingkungan	Penilaian Kinerja Masyarakat/L	Diakomodir pelaksanaan disesuaikan dengan

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Hasil Verifikasi				Keterangan
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/Satuan	Lokasi	Target/Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
			aru		Kota Probolinggo		masyarakat	Hidup Tingkat Daerah Provinsi	embaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	ketersediaan anggaran. Perlu diprioritaskan sekolah yang akan menerima Adiwiat.
51.	Kota Probolinggo	Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penyusunan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	1 paket	DLH Kota Probolinggo, Kota Probolinggo	-	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Diakomodir dengan bentuk bimtek. Pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
52.	Kota Probolinggo		Pelatihan Rehabilitasi Kerusakan Lahan dan/atau Pesisir	-	Pantai permata Kota Probolinggo, Kota Probolinggo	-	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Diakomodir untuk sasaran lokasi dan volume/target satuan dari pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Usulan yang tersaji pada table diatas merupakan usulan yang telah dilakukan telaah kemungkinan pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, pola usulan dan program kegiatan yang mendukung Tugas Pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Dinas Lingkungan Hidup dan respon kebijakan yang mendukung prioritas pembangunan lingkungan hidup provinsi Jawa Timur.

Tabel II.6 Usulan Kabupaten/ Kota Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023 yang tidak diakomodir

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Alasan tidak diakomodir
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/ Satuan	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kab. Bojonegoro	Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penyusunan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (Pembangunan Biogas)	10 Unit	1. Ds. Drokilo Kd.Adem 2. Ds. Soko, Temayang 3. Ds. Jono, Temayang 4. Ds. Kunci, Temayang 5. Ds. Temayang, TMY, Kab. Bojonegoro	Merupakan kewenangan Dinas Energi dan Sumber Dayamineral Provinsi Jawa Timur
2.	Kab. Bojonegoro	Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penyusunan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (Pembangunan Biogas)	10 Unit	Ds. Jati Gede, Sumberrejo 7. Ds. Karang Dinoyo, Sumberrejo 8. Ds. Setren, Ngasem 9. Ds. Kumpul Rejo, Kapas 10. Ds. Pilanggede, Balen, Kab. Bojonegoro	Merupakan kewenangan Dinas Energi dan Sumber Dayamineral Provinsi Jawa Timur
3.	Kab. Lumajang	Lingkungan Hidup	Pembinaan Masyarakat Hukum Adat terkait dengan	-	Desa Ranu Pani Kecamatan Sendoro,Desa Argosari Kecamatan Sendoro,Desa Pakel	Tidak diakomodir. Secara internal PD masih mendiskusikan bentuk kegiatan

NO	Usulan kabupaten/ Kota					Alasan tidak diakomodir
	Kabupaten / Kota	Kategori Usulan	Uraian Usulan	Target/ Satuan	Lokasi	
			Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, Kab. Lumajang	
4.	Kab. Probolinggo	Lingkungan Hidup	Fasilitasi Penyusunan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (Pembangunan Biogas)	10 Unit	Kab. Probolinggo	Merupakan kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya mineral Provinsi Jawa Timur

Usulan yang tersaji pada table diatas merupakan usulan tidak diakomodir dengan mempertimbangan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Dinas Lingkungan Hidup dan respon kebijakan yang mendukung prioritas pembangunan lingkungan hidup provinsi Jawa Timur.

Aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan maupun saran pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pada tahap penyusunan rancangan akhir Renja tahun 2023 tidak terdapat usulan dalam pokok-pokok pikiran dewan seperti disajikan pada table II.6 Dukungan Perangkat daerah dalam pokok-pokok pikiran dewan dibawah ini.

Tabel II.6 Dukungan Perangkat daerah dalam pokok-pokok pikiran dewan.

NO	Pokok Pikiran Dewan	Uraian Dukungan	Lokasi	Besaran/ volume	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pada tahap Rancangan akhir penyusunan rencana kerja paska Penyempurnaan Akhir RKPD , Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur melakukan penyesuaian Rencana target dan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan melalui SIPD . Berdasarkan hal tersebut , terdapat usulan hibah non pokok pikiran yang diusulkan oleh kelompok masyarakat/institusi berupa pembangunan zona konservasi KEHATI JATIM CETTAR Tahap 1 , sebagaimana tabel berikut :

NO	Jenis	Uraian Dukungan	Lokasi	Besaran/ volume	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Hibah Non Pokok Pikiran	Pembangunan Zona Konservasi KEHATI JATIM CETTAR (Tahap I)	Malang	10 Ha	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	APBD	4.000.000.000	Belum ada rekomendasi; Hingga saat ini UB Forest belum mengajukan proposal kegiatan

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

III.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Agar penetapan prioritas pembangunan daerah tepat sasaran dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional, maka perlu adanya penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Hasil dari pemetaan dan analisis korelasi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah tercantum pada Tabel III.1 dan Tabel III.2 sebagai berikut.

Tabel III. 1.a Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023	Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023
Peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan dan pemerataan Sumber Daya Manusia untuk mendukung Daya Saing Daerah menyambut era industry perdagangan dan jasa berbasis argo guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Penyusunan Rancangan akhir Renja tahun 2023 berpedoman pada kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RKP tahun 2023 dan diselaraskan dengan Tema Pembangunan prioritas provinsi yang disajikan pada table III.1.a. dan tabel III.1.b.

Tabel III. 1.b. Prioritas, dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Jawa Timur Tahun 2023

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2023, Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, mendukung secara langsung prioritas Prioritas Pembangunan Nasional maupun prioritas Pembangunan provinsi Jawa Timur 6, yaitu **“Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup”**.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel III. 2. Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Renja DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Tujuan : Meningkatkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup			
Sasaran	Indikator	Target Tahun 2023	
		Target	Satuan
1	2	3	4
Terkendalinya Pencemaran Air di Wilayah Sungai (WS) Strategis dan Udara serta kerusakan Lahan	Menurunnya Beban Pencemaran Air untuk parameter:		
	BOD	7,10	(mg/lt)
	TSS	10,75	(mg/lt)
	E – Coli	1.465	(MPN/100ml)
	total Coli	2.230	(MPN/100ml)
Meningkatnya Kualitas Udara Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian)	Meningkatnya Kualitas Udara Ambient Perkotaan (Roadsite, Permukiman dan Perindustrian) parameter:		
	SO ₂	17,60	ppm
	NO ₂	8,08	ppm
Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah dan Limbah B3	Persentase Sampah yang dikelola	96,40	%
	Persentase Limbah B3 yang dikelola	63,30	%
	Persentase usaha dan atau kegiatan yang taat terhadap perundang – undangan lingkungan hidup (%)	18	%
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	81,22	angka

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Renja DLH Prov. Jatim merupakan kinerja ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur. Tujuan dan sasaran RPJMD serta Indikator Kinerja Daerah adalah seperti yang dijelaskan didalam tabel III.2.1 tujuan dan sasaran DLH Jatim mengacu RPJMD Provinsi Jawa Timur dibawah ini:

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Target Capaian				Akhir
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66.37 - 66.73	66.74 - 67.10	64.30 - 64.34	64.35 - 64.39	68.10 - 69.30	69.31 - 69.96	69.31 - 69.96
	Indeks Kualitas Air (IKA)	52.97 - 53.94	53.95 - 54.92	48.50	48.56	53.73	54.46	54.46
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	83.51 - 83.70	83.71 - 83.90	83.32	83.38	83.94	85.07	85.07
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	63.57 - 63.60	63.61 - 63.64	46.00	46.00	47.50	48.15	48.15
	Indeks Kualitas Air laut (IKAL)	-	-	60.95	60.96	82.71	83.83	83.83

III.3. Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan, serta penyelesaian isu-isu penting pembangunan daerah, maka perlu dilakukan perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur. Perumusan program dan kegiatan prioritas ini didasarkan melalui harmonisasi dan penyelarasan antara Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Perubahan Renstra DLH Tahun 2019-2024, Peraturan Kementerian Dalam Negeri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Rancangan RKPD Tahun 2023. Sehingga program dan kegiatan DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yang ditetapkan untuk mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target 2023	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN		79 Persen	32,533,607,000			80 Persen 96 Persen 94 Persen	34,462,859,000
						Persentase indikator program yang tercapai		95 Persen					
						Persentase Realisasi Anggaran		97 Persen					
2	11	001	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah		4 Dokumen	475,000,000			4 Dokumen	1,050,000,000
						Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah		8 Dokumen				8 Dokumen	
2	11	001	1.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	195,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	11 Dokumen	500,000,000
2	11	001	1.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Dokumen	15,000,000
2	11	001	1.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Dokumen	25,000,000
2	11	001	1.01	004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Dokumen	15,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target 2023	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	001	1.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Dokumen	25,000,000
2	11	001	1.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	5 Laporan	250,000,000
2	11	001	1.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	4 Laporan	220,000,000
2	11	001	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan		12 Laporan	28,945,663,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	12 Laporan	27,667,373,000
2	11	001	1.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115 Orang/ Bulan	28,110,663,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	115 Orang/Bulan	26,617,373,000
2	11	001	1.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	690,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	12 Dokumen	700,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target 2023	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	001	1.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	12 Dokumen	50,000,000
2	11	001	1.02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	12 Dokumen	50,000,000
2	11	001	1.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	2 Laporan	50,000,000
2	11	001	1.02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Dokumen	25,000,000
2	11	001	1.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	12 Laporan	150,000,000
2	11	001	1.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Dokumen	25,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
				Target 2023	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	11	001	1.03		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	25,000,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Laporan	50,000,000		
2	11	001	1.03	004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Laporan	50,000,000
2	11	001	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		12 Dokumen	1,138,000,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	12 Dokumen	1,493,554,000
2	11	001	1.05	001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	1,100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	12 Unit	1,250,512,000
2	11	001	1.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	0 Paket	0
2	11	001	1.05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		12 Dokumen	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	12 Dokumen	52,000,000
2	11	001	1.05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Surabaya, Semua	12 Dokumen	23,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan	12 Dokumen	191,042,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
				Target 2023	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Pegawai		Kecamatan, Semua Kelurahan				Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021						
2	11	001	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		5 Laporan	110,644,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	5 Laporan	300,700,000
2	11	001	1.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Paket	60,000,000
2	11	001	1.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Paket	65,000,000
2	11	001	1.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Paket	35,000,000
2	11	001	1.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	30,644,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Paket	80,700,000
2	11	001	1.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Laporan	60,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target 2023	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	001	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana		2 Laporan	50,000,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	2 Laporan	269,000,000
2	11	001	1.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	2 Unit	184,000,000
2	11	001	1.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	2 Unit	85,000,000
2	11	001	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		12 Laporan	1,579,000,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	12 Laporan	2,688,000,000
2	11	001	1.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Laporan	1,000,000
2	11	001	1.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	438,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	12 Laporan	437,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
				Target 2023	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	11	001	1.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Laporan	150,000,000
2	11	001	1.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 Laporan	1,100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	2 Laporan	2,100,000,000
2	11	001	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara		12 Laporan	210,300,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	12 Laporan	944,232,000
2	11	001	1.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	85,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	12 Unit	235,000,000
2	11	001	1.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Unit	3,000,000
2	11	001	1.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua	3 Unit	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889	3 Unit	156,232,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target 2023	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kelurahan				Tahun 2021		
2	11 001 1.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	2 Unit	350,000,000
2	11 001 1.09 010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	0 Unit	0
2	11 001 1.09 011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Unit	200,000,000
2	11 002	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		2 Dokumen	625,000,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	2 Dokumen	1,400,000,000
2	11 002 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		30 %	237,310,600		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	50 %	670,000,000
				25 %			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri	35 %	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target 2023	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Hidup (RPPLH) Provinsi					050/5889 Tahun 2021		
2	11 002 1.01 001	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	137,310,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Dokumen	378,000,000
2	11 002 1.01 002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Dokumen	292,000,000
2	11 002 1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		75 %	387,689,400		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	100 %	730,000,000
2	11 002 1.02 001	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Dokumen	202,000,000
2	11 002 1.02 002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	2 Dokumen	303,000,000
2	11 002 1.02 003	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	0 Dokumen	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target 2023	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	002	1.02	004	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	177,689,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Dokumen	225,000,000
2	11	003			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Kabupaten/ kota yang meningkat kualitas udara		3 Kab/Kota	1,827,428,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	3 Kab/Kota	3,175,000,000
						Luas lahan kritis yang dikonservasi/ rehabilitasi		4 Ha			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	4 Ha	
						PAD atau Retribusi Daerah (Milyar)		1.2 Milyar			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	1.2 Milyar	
						Terpublikasikannya data hasil pemantauan kualitas air Badan Air Setiap Bulan Sekali		12 Kali			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	12 Kali	
2	11	003	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik pantau kualitas air		65 Titik	833,697,850		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	70 Titik	2,124,204,000
						Jumlah titik pantau kualitas air laut		8 Titik			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	9 Titik	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target 2023	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah titik pantau kualitas udara		24 Titik			dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021 Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	108 Titik	
2	11 003 1.01 001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	143 Dokumen	796,567,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	187	1,924,204,000
2	11 003 1.01 002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	37,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	2	200,000,000
2	11 003 1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sarana dan Prasarana penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran lingkungan	8 Unit	326,292,550		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	2 Unit	100,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
				Target 2023	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	11	003	1.02	001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	326,292,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Laporan	100,000,000
2	11	003	1.02	002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Lokasi	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	0 Lokasi	-
2	11	003	1.02	003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Titik	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	0 Titik	-
2	11	003	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup		8 Kegiatan	667,437,600		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	8 Kegiatan	950,796,000
2	11	003	1.03	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	39,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Dokumen	20,000,000
2	11	003	1.03	003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Dokumen	20,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
				Target 2023	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	11	003	1.03	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	608,437,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	6 Dokumen	910,796,000
2	11	004			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah Kabupaten/ Kota yang diberikan pembinaan dan pengelolaan KEHATI		15 Kab/Kota	4,860,000,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	20 Kab/Kota	1,279,000,000
2	11	004	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah kegiatan action learning yang dilaksanakan di kabupaten /kota		5 Kegiatan	4,860,000,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	5 Kegiatan	1,279,000,000
2	11	004	1.01	001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	4,048,000,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Dokumen	354,000,000
2	11	004	1.01	002	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.4 Ha	453,384,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	0.2 Ha	275,000,000
2	11	004	1.01	004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.06 Ha	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	0.06 Ha	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target 2023	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	004	1.01	006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	266,616,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	200 Orang	450,000,000
2	11	005			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola		63.3 Persen	300,000,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	64 Persen	527,000,000
						Persentase Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 skala Provinsi		100 Persen			Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	100 Persen	
2	11	005	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Volume Limbah B3 lintas kabupaten/Kota yang berhasil dikumpulkan oleh Provinsi		60 Persen	300,000,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	65 Persen	527,000,000
2	11	005	1.01	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	170,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Dokumen	150,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
				Target 2023	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	11	005	1.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	10 Dokumen	377,000,000
2	11	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase peningkatan ketaatan usaha/ kegiatan		16 Persen	720,072,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	17 Persen	804,000,000
2	11	006	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Presentase pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha/ kegiatan		65 Persen	720,072,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	75 Persen	804,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
				Target 2023	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	11	006	1.01	001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 Dokumen	172,572,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	75 Dokumen	194,204,000
2	11	006	1.01	002	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Orang	55,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	17 Orang	75,000,000
2	11	006	1.01	003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175 Laporan	460,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	185 Laporan	488,796,000
2	11	006	1.01	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	32,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	1 Dokumen	46,000,000
2	11	007			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN	Persentase Masyarakat hukum adat (MHA), kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui		100 Persen	50,000,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	100 Persen	200,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target 2023	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PPLH								
2	11	007	1.01						
	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Masyarakat hukum adat (MHA), kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui		3 MHA	25,000,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	3 MHA	100,000,000
2	11	007	1.01	001					
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	3 Dokumen	100,000,000
2	11	007	1.02						
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan	Jumlah Kegiatan untuk Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		6 Kegiatan	25,000,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	6 Kegiatan	100,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
				Target 2023	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Hak MHA yang terkait dengan PPLH									
2	11 007 1.02 001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	3 Dokumen	100,000,000
2	11 008	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peserta yang meningkat pengetahuannya dan kemampuannya mengenai pengelolaan lingkungan hidup		55 Persen	215,000,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	60 Persen	400,000,000
2	11 008 1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		6 Kegiatan	215,000,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	6 Kegiatan	400,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Target 2023	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	008	1.01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Lembaga	115,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	4 Lembaga	200,000,000
2	11	008	1.01	002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	70,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	6 Dokumen	150,000,000
2	11	008	1.01	003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Orang	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	90 Orang	50,000,000
2	11	009			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan perolehan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat		11 Persen	250,000,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	11.5 Persen	354,000,000
2	11	009	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		146 Penghargaan	250,000,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	146 Penghargaan	354,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
				Target 2023	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	11	009	1.01	001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	146 Entitas	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	146 Entitas	354,000,000
2	11	010			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan		100 Persen	370,000,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	100 Persen	500,000,000
2	11	010	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan		48 Pengadu an	370,000,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	48 Pengaduan	500,000,000
2	11	010	1.01	001	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Dokume n	185,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	40 Dokumen	250,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Target 2023	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11 010 1.01 002	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Dokumen	185,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	20 Dokumen	250,000,000
2	11 011	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		96,5 Persen	700,000,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	97 Persen	1,769,000,000
2	11 011 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		99 Persen	700,000,000		Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	99 Persen	1,769,000,000
2	11 011 1.01 001	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Dokumen	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	4 Dokumen	162,820,000
2	11 011 1.01 004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	26,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Keppmendagri 050/5889 Tahun 2021	3 Dokumen	300,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
				Target 2023	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	11	011	1.01	005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan		2 Dokumen	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	5 Dokumen	463,400,000
2	11	011	1.01	006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Ton	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	0 Ton	-
2	11	011	1.01	007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	299,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	6 Unit	842,780,000
2	11	003	1.01	003	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106 Dokumen	1,889,819,000	Kota Surabaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indikator Sub kegiatan Sesuai dengan Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021	250 Dokumen	3,000,000,000
					TOTAL				44,340,926,000				47,870,859,000

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, serta Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan, maka perlu dilakukan perumusan program dan kegiatan yang lebih spesifik untuk mendukung prioritas Provinsi Jawa Timur dalam pembangunan daerah. Hasil analisis korelasi antara Program dan Kegiatan Prioritas Provinsi Jawa Timur dengan Program dan Kegiatan DLH Provinsi Jawa Timur tahun 2023 tercantum pada Tabel III.4 . Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel III.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.

4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2022 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. DLH Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, DLH Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup;
- b. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas di lingkungan hidup; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa DLH Provinsi Jawa Timur yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, yang dituangkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dalam Rancangan rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

No	Prioritas Provinsi	Nawa Bhakti	Program Icon	Uraian Kegiatan Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PP6 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Jatim Harmoni	Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	Fasilitasi Instrumen Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	60,000,000	
							Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	150,000,000	
							Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0	
							Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	177,689,400	
2	PP6 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Jatim Harmoni	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	796,567,850	
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	37,130,000	
							Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	326,292,550	
							Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0	

No	Prioritas Provinsi	Nawa Bhakti	Program Icon	Uraian Kegiatan Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0		
							Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	39,000,000	
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	20,000,000	
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	608,437,600	
3	PP6 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Jatim Harmoni	Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	Pengelolaaan Keanekaragaman Hayati	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	4,000,000,000		
							Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	453,384,000		
							Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	140,000,000		
							Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	266,616,000		
4	PP6 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Jatim Harmoni	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Penanganan dan Pengurangan sampah dan Limbah B3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	170,000,000		

No	Prioritas Provinsi	Nawa Bhakti	Program Icon	Uraian Kegiatan Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	130,000,000	
5	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Jatim Harmoni	Program penataan hukum dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	172,572,000	
							Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	55,500,000	
							Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	460,000,000	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	32,000,000	
6	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Jatim Harmoni	Program penataan hukum dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup	Penguatan kelembagaan di bidang lingkungan hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	115,000,000	

No	Prioritas Provinsi	Nawa Bhakti	Program Icon	Uraian Kegiatan Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	70,000,000	
							Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	30,000,000	
							PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Jatim Harmoni	Program penataan hukum dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	185,000,000	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	185,000,000	
8	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Jatim Harmoni	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Penanganan dan Pengurangan sampah dan Limbah B3	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	125,000,000	
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	26,000,000	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	250,000,000	

No	Prioritas Provinsi	Nawa Bhakti	Program Icon	Uraian Kegiatan Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	0	
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	299,000,000	

4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, dalam Rancangan rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Lingkungan hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.2 Program Prioritas Perangkat daerah Tahun 2023

No	URAIAN PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR CAPAIAN	NOMENKLATUR			SUMBER PENDANAAN	PAGU INDIKATIF	KETERANGAN
			PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyusunan RPPLH Provinsi	- Progres Penyusunan Dokumen RPPLH - Fasilitasi Penyusunan RPPLH Kab/ Kota	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	PAD	137310600	
					Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	PAD	100,000,000	
2	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Hukum Adat	- Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang Dilakukan Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	PAD	25,000,000	
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	PAD	25,000,000	

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan beedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
Jl. Wisata Menanggal 38 Telephone 031 8543852-3 Fax 031 854385
Email : dlh@jatimprov.go.id Website : dlh.jatimprov.go.id

